

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Hari Pinanti<sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

*Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah, termasuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat sebagai fokus penelitian.*

*Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kartanegara .*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data model interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing/ verifying).*

*Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (masyarakat umum & peserta) di Desa Sidomukti dalam pelaksanaan musrenbangdes masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya: pertama, mekanisme penyelenggaraan musrenbangdes yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para aktor-aktor yang terlibat. Kedua, terjadinya dominasi elit desa yang dianggap telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Sidomukti. Ketiga, kurangnya pemahaman dari masyarakat dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Sidomukti. Dan terakhir, karena tidak adanya skala prioritas dalam penetapan daftar usulan prioritas yang kemudian menyebabkan proyek pembangunan yang ada masih belum sesuai dengan urgensi yang ada.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi masyarakat, Pembangunan, Musrenbangdes*

## **PENDAHULUAN**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman Email: haripinanti@yahoo.co.id

### ***Latar Belakang***

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memang telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan desa, bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (21) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang diartikan sebagai forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa sendiri dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk mencapai rencana kegiatan di desa 5 tahun (RPJM-D) dan 1 tahunan (RKP-D).

Salah satu maksud diterbitkannya Kebijakan tersebut di atas ialah untuk menjamin terselenggaranya proses perencanaan pembangunan termasuk pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dengan berbasis partisipatif. Hal ini dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 yang menegaskan bahwa salah satu azas dan tujuan perencanaan pembangunan adalah: “mengoptimalkan partisipasi masyarakat” yaitu keikut-sertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Sedangkan untuk pelaksanaan musrenbangdes berbasis partisipatif dijelaskan pada Permendagri No. 66/2007 Pasal 1 ayat (11) seperti yang telah disebutkan di atas.

Desa Sidomukti merupakan desa yang menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam merencanakan pembangunan desa. Penyelenggaraan musrenbangdes di Desa Sidomukti tersebut berpedoman pada Permendagri No. 114 tahun 2014 dan Perbup Kukar No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwasannya partisipasi masyarakat Desa Sidomukti dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat dikatakan kurang atau belum optimal yakni dengan melihat tingkat kehadiran masyarakat pada musyawarah RT dan juga musyawarah Desa. Dari pelaksanaan kedua musrenbang tersebut (tingkat RT dan Desa), Penulis perkirakan kehadiran masyarakat hanya sebesar 60%.

Berdasarkan fenomena diatas, Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai: “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara”

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang dihadapi adalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Manfaat Penelitian***

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Segi Teoritis yaitu Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis
2. Segi Praktis yaitu Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk terus meningkatkan peran aktifnya, bagi masukan bagi instansi yang terkait untuk terus memberikan ruang bagi masyarakat serta sebagai data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Teori dan Konsep***

#### ***Pembangunan dan Pemberdayaan***

Setiap perubahan yang menuju pada suatu keadaan yang lebih baik dapat dimaknai sebagai pembangunan. Perubahan tersebut dapat bersifat alamiah dan dapat pula karena direncanakan atau merupakan hasil rekayasa manusia.

Menurut Rappaport (dalam Anwas, 2013:49), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dalam perkembangannya, model pemberdayaan telah menciptakan suatu metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk merencanakan program pembangunan. merencanakan program pembangunan. Metodologi yang dimaksud adalah apa yang dikenal dengan PAR (*Participation Action Research*). Seperti halnya dengan model *Community Development* (CD) maka PAR juga mengikutsertakan rakyat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai pemberdayaan masyarakat.

#### ***Partisipasi Masyarakat***

Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovasi lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi. (Menurut Soemarto dalam Solekhan, 2014:141)

### ***Pembangunan Pedesaan***

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

### ***Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)***

Musrenbangdes menurut Permendagri No. 114 tahun 2014 dan Perbup Kukar No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa diartikan sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### ***Definisi Konsepsional***

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat di Desa Sidomukti dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Berdasarkan judul yang diajukan oleh Peneliti, maka penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam Usman (2011) dikatakan bahwa Penelitian Deskriptif Kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

### ***Fokus Penelitian***

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat desa Sidomukti dalam pelaksanaan musrenbangdes yang dilihat dan dinilai dari beberapa aspek, diantaranya:
  - a) Mekanisme pelaksanaan musrenbangdes
  - b) Aktor-aktor yang terlibat
  - c) Tingkat kehadiran dan keaktifan peserta
  - d) Pola pengambilan keputusan dalam musrenbangdes
2. Faktor penghambat bagi masyarakat (umum) dalam berpartisipasi dalam

musyawarah perencanaan pembangunan desa.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai bahan pertimbangan Peneliti memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian ialah karena di Desa ini masyarakat masih kurang dalam memberikan partisipasinya, khususnya saat pelaksanaan musrenbangdes.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh dua jenis data tersebut, maka diperlukan key informan dan juga informan. Untuk menentukan key informan digunakan tehnik *purposive sampling* sedangkan untuk informannya digunakan tehnik *snowball sampling*.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan (*key informan*) adalah Kepala Desa Sidomukti, sedangkan Informannya ialah peserta musrenbangdes seperti ketua dusun, ketua Rt, dan organisasi masyarakat lainnya. Untuk menentukan key informan digunakan tehnik *purposive sampling* sedangkan untuk informannya digunakan tehnik *snowball sampling*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan *library research* (penelitian kepustakaan) dan *Field work research* (penelitian lapangan).

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian kepustakaan, dimana di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara :
  - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan.
  - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
  - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai sumber data.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, berupa jenis data berbentuk tulisan yang sifatnya bukan angka. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. (Milles and Huberman dalam Sugiyono,2013:337).

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Sidomukti adalah salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1982 tepatnya bulan September yang masyarakatnya berasal dari daerah seragen, Brebes Jawa tengah dan daerah Ciamis, Jawa Barat dengan jumlah 100 KK dan dari masyarakat lokal Kutai sebanyak 4 KK. Pada awalnya daerah trans ini diberi nama sebagai Satuan Pemukiman (SP) 3 atau ada juga yang menyebut Sebulu 3 karena masih masuk ke dalam wilayah transmigrasi daerah sebulu. Kemudian setelah berakhir masa pembinaan trans dibentuklah desa persiapan dengan nama Desa Sidomukti.

Berdasarkan monografi desa, luas wilayah Desa Sidomukti menurut penggunaan sebesar 1.604,05 ha/m<sup>2</sup> dengan total RT sebanyak 25. Di Desa Sidomukti ini terbagi menjadi kedalam 2 dusun yakni Dusun Sidomulyo dan Dusun Buana Mekar . Sebagian besar penduduk Desa Sidomukti bermatapencaharian sebagai petani yakni sebesar 75% dan juga sebagian besar penduduk Desa Sidomukti memiliki latar pendidikan tamatan SD yakni sebesar 64%.

Desa Sidomukti memiliki batas-batas wilayah yang memisahkan Desa Sidomukti dengan desa sekitarnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Puan Cepak, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panca Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cipari Makmur dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabintulung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sidomukti**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Peneliti dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes cukup atau kurang baik, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut akan dijelaskan berikut ini:

#### ***Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbangdes Belum Berjalan Maksimal***

Mekanisme dalam hal ini diartikan sebagai prosedur atau sistem yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan musrenbangdes. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh Peneliti, maka dapat diketahui bahwa mekanisme penyelenggaraan musrenbangdes telah sesuai dengan apa yang ada diregulasi ataupun konsep yang ada. Namun meskipun demikian, pada kenyataannya pelaksanaan dari setiap tahapan yang ada tersebut masih belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal.

Adapun hal-hal yang belum berjalan dengan maksimal diantaranya ialah saat tahap persiapan, masih ada beberapa RT yang tidak melaksanakan Musyawarah RT, Susunan acara saat pelaksanaan juga masih belum efektif dan

efisien serta penetapan tim Penyusun RKP pada tahap pasca musrenbangdes masih belum sesuai dengan apa yang ada di regulasi yakni Permendagri No. 114 tahun 2014 dan Perbup Kukar No. 13 tahun 201g tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### ***Terjadinya Dominasi Elit Desa***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh Peneliti, maka dapat diketahui bahwa penetapan/pemilihan aktor-aktor dalam penyelenggaraan musrenbangdes telah sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan, baik itu Permendagri No. 114 tahun 2014 maupun Perbup Kukar No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh itu pula, maka dapat Peneliti ketahui bahwa pada pelaksanaan musrenbangdes masyarakat umum tidak lagi dilibatkan secara langsung, mereka hanya diwakili saja oleh para elit desa. Menurut pemikiran Peneliti, dengan tidak lagi melibatkan masyarakat umum secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbangdes dapat dikatakan kurang tepat. Sebab apabila hanya para elit desa yang diundang, maka akan menyebabkan timbulnya kesan adanya dominasi elit desa.

Dalam hal ini yang menjadi masalah bukanlah mereka yang menetapkan aktor-aktor yang akan dilibatkan, akan tetapi regulasi yang ada. Karena dalam regulasi yang ada, memang tidak ada anjuran bahwa masyarakat umum harus terlibat langsung saat pelaksanaan musrenbangdes.

### ***Kurangnya Sosialisasi dan Rendahnya Pengetahuan Serta Keterampilan Peserta***

Tingkat kehadiran dan juga tingkat keaktifan peserta musrenbangdes merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar partisipasi peserta dalam pelaksanaan musrenbangdes.

Berdasarkan data yang telah diperoleh Peneliti, maka dapat diketahui bahwa partisipasi peserta dilihat dari segi kehadirannya dapat dikatakan cukup meskipun kurang baik. Dan alasan dari para peserta yang hadir dalam pelaksanaan musrenbangdes ini ialah karena faktor kesadaran diri. Artinya, mereka paham bahwasannya kehadiran mereka dalam pelaksanaan musrenbangdes ini penting untuk kemajuan desanya kedepan

Sedangkan apabila dilihat dari segi keaktifannya, berdasarkan data yang diperoleh Peneliti maka tingkat keaktifan peserta sangat rendah yakni hanya 11% peserta yang aktif dari total peserta yang hadir saat itu. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari peserta mengenai musrenbangdes itu sendiri dan juga karena kurangnya pengetahuan serta keterampilan dari peserta. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan masyarakat di Desa Sidomukti dilihat dari monografi desa mayoritas hanyalah tamatan SD.

### ***Pengambilan Keputusan Tidak Murni Menggunakan Pendekatan Bottom-Up serta tidak menggunakan Skala prioritas***

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat Peneliti ketahui bahwa pola pengambilan keputusan (penetapan usulan prioritas) yang ada pada

---

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan MUSRENBANGDES (Hari Pinanti)  
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Sidomukti ini bersifat campuran antara *Top-down* dan *Bottom Up*. Hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes peserta masih di dikte oleh pimpinan rapat mengenai usulan yang akan dijadikan sebagai prioritas.

Disamping tidak murni menggunakan pendekatan *bottom-up*, keterangan di atas juga menunjukkan bahwa dalam Penetapan daftar usulan prioritas dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Sidomukti juga tidak menggunakan skala prioritas. Daftar usulan prioritas yang ada di Desa Sidomukti merupakan kumpulan daftar usulan yang telah diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti ketua RT, kelompok tani dan lain sebagainya. Karena tidak adanya penyaringan atau penyeleksian dengan menggunakan skala prioritas, maka daftar usulan prioritas menjadi sangat banyak sekali, sebab ini hanyalah rekapan dari usulan-usulan yang dibawa oleh para elit desa atau perwakilan masyarakat.

Selanjutnya dalam tahap perangkaan atau tahap penyusunan RKP unsur masyarakat tidak lagi dilibatkan, hanya dusun saja. Padahal apabila mengacu kepada Perbup Kukar No. 13 tahun 2016, tim RKP itu harus melibatkan unsur masyarakat baik masyarakat yang memiliki kedudukan ataupun tidak dan juga harus ada perwakilan dari kelompok perempuan. Dan berdasarkan pada hasil penelitian diketahui juga bahwasannya pembangunan apa yang akan dipilih tetap berada ditangan Kepala Desa dan pemerintah desa, sebab yang mengetahui pasti tentang anggaran desa yang ada ialah mereka.

### **Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan pada sub-sub sebelumnya maka dapat Peneliti pahami bahwa yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan musrenbangdes ini ialah:

1. Regulasi yang ada kurang memberikan ruang atau akses bagi masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan musrenbangdes. Dalam peraturan perundang-perundangan yang ada keterlibatan masyarakat umum terbatas sampai pada tahap persiapan musrenbangdes yakni pada musyawarah RT.
2. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena memang sebagian besar penduduk di Desa Sidomukti memiliki latarbelakang pendidikan yang kurang, yakni mayoritas lulusan SD dengan presentase sebesar 64% .
3. Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai musrenbangdes dan juga pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa demi kemajuan desa. Hal ini disebabkan karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi untuk mengenalkan musrenbangdes kepada

masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang telah dipilih menjadi perwakilan dari masyarakat umum.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh Peneliti, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Partisipasi masyarakat Desa Sidomukti pada pelaksanaan musrenbangdes dapat dikatakan kurang. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya:
  - a. Mekanisme pelaksanaan musrenbangdes masih belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal baik itu pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan maupun pada tahap pasca musrenbangdes.
  - b. Regulasi atau sistem yang ada memang tidak memberikan peluang atau akses bagi masyarakat umum untuk bisa terlibat langsung kedalam pelaksanaan musrenbangdes.
  - c. Kurangnya pemahaman dari masyarakat yang diakibatkan tidak pernah adanya sosialisasi/penyuluhan secara khusus mengenai musrenbangdes dan juga pentingnya partisipasi masyarakat kepada masyarakat khususnya para aktor-aktor yang biasa dilibatkan dalam pelaksanaan musrenbangdes.
  - d. Rendahnya pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat mengenai musrenbangdes maupun mengenai pentingnya partisipasi masyarakat yang dikarenakan latar belakang pendidikan masyarakat yang kurang mumpuni
  - e. Pola pengambilan keputusan untuk daftar usulan prioritas itu tidak sepenuhnya bersifat *bottom-up* melainkan campuran antara *bottom-up* dengan *top-down* serta tidak menggunakan skala prioritas (penyaringan/penyeleksian dengan kriteria-kriteria tertentu)..
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbangdes ialah diantaranya
  - a. Regulasi yang ada tidak memberikan ruang atau akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan musrenbangdes,
  - b. Kurangnya pemahaman dari masyarakat karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai musrenbangdes kepada masyarakat
  - c. Pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat masih kurang dikarenakan latar belakang pendidikan yang dimiliki masih kurang mumpuni.

### ***Saran***

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah Peneliti sebutkan di atas, maka berikut ini saran yang dapat Peneliti berikan:

1. Untuk menjamin proses penggalian gagasan di tingkat RT benar-benar terselenggara, maka seyogyanya pemerintah desa mewajibkan setiap ketua RT untuk membuat bukti/laporan bahwa mereka benar-benar telah melakukan musyawarah RT. Kemudian untuk memaksimalkan penggalian

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan MUSRENBANGDES (Hari Pinanti)

---

gagasan ini, seharusnya pemerintah desa juga mengintruksikan kepada Ketua RT maupun ketua Dusun untuk menggunakan media-media seperti sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 16 Perbup Kukar No. 13 tahun 2016.

2. Publikasian tentang jadwal penyelenggaraan musrenbangdes ada baiknya dilakukan secara terbuka jangan hanya melalui surat undangan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum tahu bahwa desa akan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, mengingat pada dasarnya masyarakat itu merupakan subjek dan juga objek dari pembangunan desa itu sendiri
3. Hasil musrenbangdes juga sebaiknya disebarluaskan kepada masyarakat umum tidak hanya ditempel di papan pengumuman balai desa karena bukanlah rutinitas masyarakat Sidomukti untuk datang ke balai desa, terlebih bila mereka tidak memiliki jabatan atau kepentingan tertentu. Dan jika memang pemerintah desa telah menggunakan ketua RT/Dusun sebagai perpanjangan tangan mereka untuk menyampaikan hasil musrenbangdes (baik RPJM/RKP), maka pemerintah desa juga harus memastikan bahwa ketua RT/Dusun tersebut benar-benar telah melakukannya. Maka, lagi dan lagi pemerintah desa harus meminta bukti/laporan bahwa ketua RT dan ketua Dusun tersebut telah menunaikan amanahnya untuk menyebarluaskan hasil musrenbangdes kepada masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar setiap elemen masyarakat mengetahui apa yang menjadi rencana pembangunan di desa mereka. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa. Karena cara ini merupakan salah satu perwujudan dari prinsip transparansi yang selama ini dibutuhkan masyarakat.
4. Susunan acara saat pelaksanaan musrenbangdes sebaiknya diatur dengan tepat. Do'a penutup jangan dibacakan sampai acara benar-benar selesai. Karena dengan do'a penutup dibacakan akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa acara telah selesai dan akhirnya menyebabkan banyak peserta yang pulang sebelum acara selesai.
5. Tim penyusun RKP sebaiknya mengikuti aturan yang ada dalam Perbup Kukar No. 13 tahun 2016. Didalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa kader pemberdayaan masyarakat Desa, perwakilan perempuan dan unsur masyarakat lainnya juga berhak untuk menjadi tim penyusun RKP.
6. Untuk meningkatkan kemampuan SDM (peserta musrenbangdes), maka ada baiknya pemerintah desa memfasilitasi para aparatur desa ataupun kepada masyarakat dengan mengadakan seminar ataupun sosialisasi mengenai musrenbangdes. Dengan demikian SDM yang ada desa Sidomukti bisa berpartisipasi dengan baik saat pelaksanaan musrenbangdes. Dan ada baiknya sosialisasi ini tidak dilakukan saat musrenbangdes dilaksanakan, karena akan banyak memakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk bermusyawarah. Dengan cara ini pula diharapkan akan menambah tingkat

- kehadiran serta tingkat keaktifan para peserta musrenbangdes.
7. Dalam proses pengambilan keputusan (penetapan daftar usulan prioritas) sebaiknya menggunakan skala prioritas, agar nantinya daftar usulan prioritas yang diambil akan sesuai dengan urgensi yang diperlukan masyarakat.
  8. Regulasi yang ada ada-baiknya dirubah agar dalam pelaksanaan musrenbangdes masyarakat umum bisa dilibatkan secara langsung tidak hanya di tahap persiapan saja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto.2013.*Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat*. Jakarta:RajaGrafindo Persada
- Adisasmita, Rahardjo.2006.*Membangun Desa Partisipatif*.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Afifuddin.2012.*Pengantar Administtasi Pembangunan*.Bandung:Alfabeta
- Anwas, Oos M. 2013.*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung:Alfabeta
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogyakarta:Gava Media
- Kusuma, Aji Ratna.2013.*Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Yogyakarta: Interpena
- Mardalis.2014.*METODE PENELITIAN (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawijaya dan Juni Pranoto.2011.*Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung:Alfabeta
- Rosidin, Utang.2010.*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*.Bandung:Pustaka Setia
- Sabarno, Hari.2008.*Memandu Otonomi daerah/Menjaga Kesatuan Bangsa*). Jakarta:Sinar Garfika
- Soleh, Chabib.2014.*Dialektika Pembangunan*.Bandung:Fokusmedia
- Solekhan, Moch. 2014.*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang:Setara Press

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan MUSRENBANGDES (Hari Pinanti)  
Sudriamunawar, Haryono.2012.*Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*.  
Bandung:Mandar Maju

Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:Alfabeta

\_\_\_\_\_.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.  
Bandung:Alfabeta

Sugiyono.2012.*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta

\_\_\_\_\_.2013.*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung:Alfabeta

Sy, Pahmi.2010.*Antropologi Pedesaan*.Jakarta:Gaung Persada Pres

Syahrani.2015.*Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Makindo Grafika

### **Skripsi**

Hidayah, Arina.2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*.Jember:Universitas Jember

### **Dokumen-dokumen:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Perbup Kukar No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa